

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA
TAHUN 2018 DI KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA
TAHUN 2018 DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

NURHANG

NIM: 15.3100.022

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA
TAHUN 2018 DI KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHANG
NIM. 15.3100.022**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

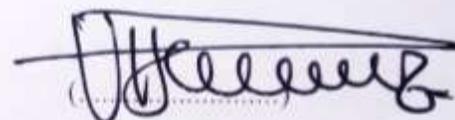
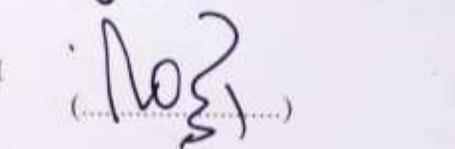
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

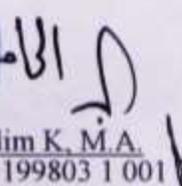
Nama Mahasiswa : Nurhang
 Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang
 Nomor Induk Mahasiswa : 15.3100.022
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare
 Nomor: B-34/In.39/FUAD/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I
 NIP : 197507042009011006
 Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I
 NIP : 198403122015031003


 (.....)

 (.....)

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



 Dr. H. Abd. Halim K., M.A.
 NIP. 19590624 199803 1 001

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

NURHANG
NIM. 15.3100.022

Telah dipertahankan didepan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 09 Maret 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I

NIP : 197507042009011006

Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I

NIP : 198403122015031003

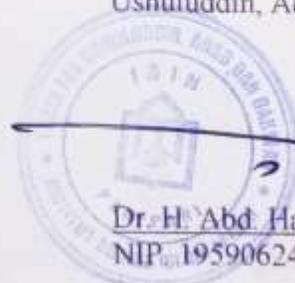
[Handwritten signatures of Dr. Iskandar and Muhammad Haramain]

[Signature] Rektor IAIN Parepare



[Signature] Dr. Ahmad Saltra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



[Signature] Dr. H. Abd. Halim K., M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhang

Nomor Induk Mahasiswa : 15.3100.022

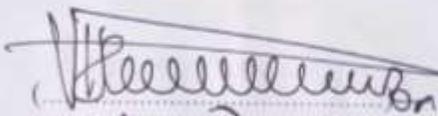
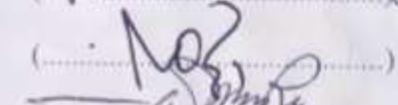
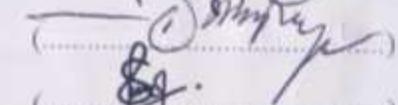
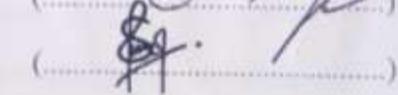
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Rektor IAIN Parepare
Nomor: B-34/In.39/FUAD/01/2019

Tanggal Kelulusan : 09 Maret 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Iskandar, S. Ag., M.Sos.I	(Ketua)	
Muhammad Haramain, M.Sos.I	(Sekertaris)	
Muhammad Jufri, M.Ag	(Anggota)	
Sulvinajayanti, S.Kom., M.I.Kom	(Anggota)	

Mengetahui;
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَخْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur tetap tercurah kepada sang yang maha ada Allah Swt., berkat nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa ia berikan sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang”, dapat diselesaikan dimana tulisan ini juga dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan baginda Muhammad saw.,. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Ruslan dan Ibunda Atira yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Kepada saudaraku, kerabat yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, K., M.A selaku Ketua Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.
3. Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar, tulus, ikhlas meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi dan saran dari awal dibuatnya skripsi ini.
4. Ibu Nurhakki, S.Sos. M.Si selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk semua ilmu serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani Studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan KPI angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak hingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Subhanahu wata'ala, selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Amin

Parepare, 18 Februari 2020


NURHANG

15.3100.022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nurhang

Nomor Induk Mahasiswa : 15.3100.022

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 23 November 1997

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi kecuali tulisan yang sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Februari 2020

Penulis,



NURHANG
15.3100.022

ABSTRAK

Nurhang, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang,* (dibimbing oleh Iskandar & Muhammad Haramain).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang, dan untuk mengetahui apakah strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang, dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi di lapangan peneliti menemukan masalah terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dari hasil observasi, peneliti mewawancarai Ketua Komisioner KPU dan Ketua divisi sosialisasi terkait upaya dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat, selain itu peneliti juga mewawancarai anggota PPS, Relawan Demokrasi dan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, KPU Kabupaten Pinrang melakukan sosialisasi sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan teori agenda setting. Teori agenda *setting* terdapat dua level yang harus dipenuhi. Level pertama upaya membangun isu umum yang dinilai penting, KPU dalam upaya membangun isu dengan penentu agenda yaitu melakukan rapat, membahas hal yang dianggap penting dalam masyarakat. Mereka akan menyusun dan mempertimbangkan seberapa penting arti Pilkada dalam masyarakat. Kemudian pada level kedua, menentukan bagian-bagian dari isu umum tersebut yang dinilai penting. Mereka yang terlibat dalam penentuan agenda, akan menyusun aspek-aspek untuk mereka sebarakan melalui media yang telah mereka tentukan, seperti menggunakan media cetak, audio, reklame, ataupun poster. Adapun strategi yang digunakan KPU terhadap peningkatan partisipasi masyarakat yaitu menggunakan teori dua tahap, tahap pertama adalah sebagai proses komunikasi massa, yaitu sumbernya adalah komunikator kepada pemuka pendapat. Pada organisasi KPU terdapat komisioner selaku komunikator, komisioner membentuk pemuka pendapat yang dikenal sebagai relawan demokrasi. Pada tahap kedua, Komisioner merekrut anggota relawan demokrasi sebanyak 25 orang. Relawan demokrasi yang terbentuk akan menyampaikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada 7 basis pemilih.

Kata Kunci : *Strategi Komunikasi, Partisipasi Masyarakat, Hak Pilih, Pinrang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis	7
2.2.1 Teori Dua Tahap	7
2.2.2 Teori Agenda Setting	9
2.3 Tinjauan Konseptual	10

2.3.1 Pemilu	10
2.3.2 Komunikasi	13
2.3.3 Strategi Komunikasi.....	15
2.3.4 Komponen-Komponen Strategi	16
2.3.5 Fungsi Strategi Komunikasi.....	20
2.3.6 Partisipasi Politik	21
2.4 Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2 Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat.....	37
4.3 Strategi Komunikasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat	44
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Pemilih Pilkada	36



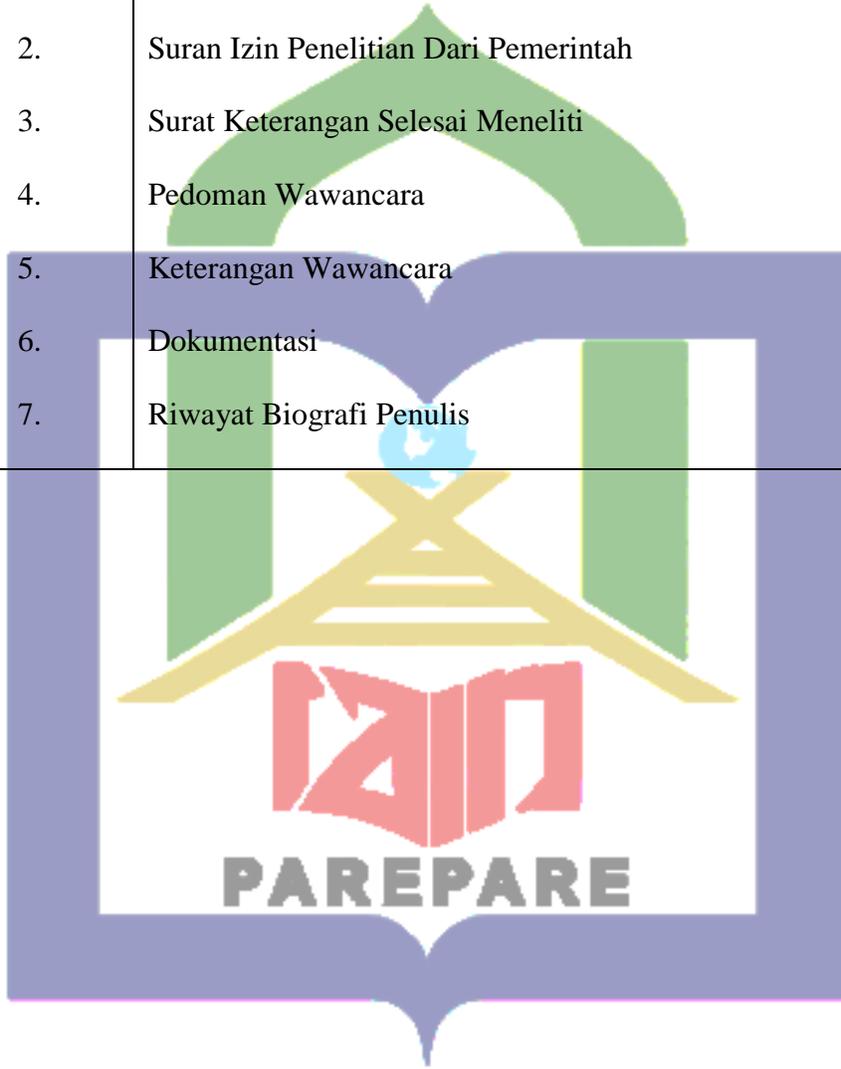
DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	23
4.2	Struktur Organisasi	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Lampiran-Lampiran
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari IAIN Parepare
2.	Suran Izin Penelitian Dari Pemerintah
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4.	Pedoman Wawancara
5.	Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sosialisasi adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat melalui proses sosialisasi politik ini sehingga anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Prosesnya berlangsung seumur hidup yang memang sengaja didapat melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.¹

Sosialisasi telah menjadi tanggung jawab KPU sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 point 24 menjelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Adapun tujuan dilakukan sosialisasi oleh KPU telah ditetapkan pada peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 pasal 4 yaitu:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu

¹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 117

c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.²

Strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pinrang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mewujudkan langkah-langkah strategis terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu dan menyempurnakan sistem pemilihan yang lebih baik dimasa mendatang.

Ciri khas negara demokratis ialah seberapa banyak negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum karena partisipasi politik rakyat (pemilih) merupakan aspek penting dalam tatanan negara yang demokrasi. Sehubungan dengan demokrasi, partisipasi politik masyarakat mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu dalam sosialisasi butuh komunikasi yang baik dengan masyarakat dimana dari komunikasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi, tidak hanya itu KPU juga membutuhkan sebuah strategi komunikasi untuk dapat mengambil perhatian masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam pesta yang demokratis menjadi tolok ukur keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan hal ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. Penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU harus memiliki strategi yang baik, terstruktur dan sistematis untuk menyadarkan

² https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2010%20TAHUN%202018.pdf di akses pada tanggal 6 Maret 2020

masyarakat bahwa berpartisipasi dalam pemilihan sangat dibutuhkan untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik ke depannya dan menyelesaikan masalah golput yang selalu muncul dalam pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.

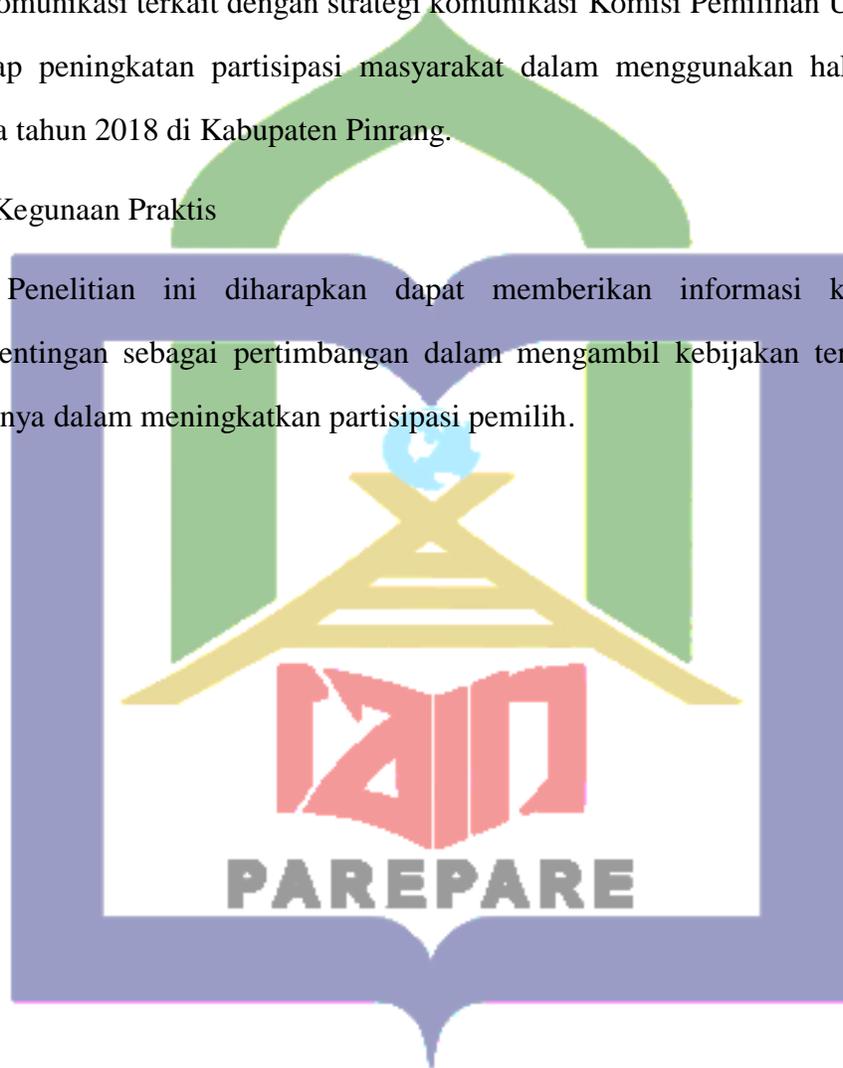
1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam kajian pengembangan ilmu komunikasi terkait dengan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pemilu, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

- 2.1.1 Skripsi yang disusun oleh Yupi Perando, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul "*Strategi Komunikasi dan Aktivitas Humas UIN Sunan Kalijaga Kepada Calon Mahasiswa Tahun 2009*". Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas UIN Sunan Kalijaga ini melakukan 4 persiapan yaitu: mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikator dalam komunikasi dan terakhir peran komunikator dalam komunikasi. Sedangkan aktivitas humas yang dilakukan oleh Humas UIN Sunan Kalijaga ada 4 tahap yaitu, penemuan fakta, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada aktivitas humas yang dilakukan oleh Humas UIN Sunan Kalijaga. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas strategi komunikasi dan sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Skripsi yang disusun oleh Jiddatun Nihayahtahun 2016 yang merupakan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam

³Yupi Perando, "*Strategi Komunikasi dan Aktivitas Humas UIN Sunan Kalijaga Kepada Calon Mahasiswa Tahun 2009*" (Skripsi Sarjana: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009, h. 69

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ *Strategi Komunikasi Penggelangan Dana Sosial Sedekah Rombongan Melalui Instagram*” Penelitian tersebut lebih menekankan mengenai media yang digunakan dalam metode penggelangan dana, media yang digunakan sebagai strategi komunikasi ialah media sosial instagram, dimana instagram merupakan media baru pada saat itu sehingga pengguna instagram dirasa lebih efektif.⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang perencanaan strategi dengan menggunakan model komunikasi *Hierachy Effect* Sedangkan peneliti membahas tentang strategi komunikasi yang digunakan KPU terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

- 2.1.2 Skripsi yang disusun oleh Hasan Ma’ali Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Yang berjudul “*Strategi Komunikasi Politik Kiai dalam Sukses Pilpres 2014 (Studi di Desa Gardu Barat Kecamatan Gading Kabupaten Sumenep Madura)*”. Strategi komunikasi politik yang digunakan oleh kiai dalam sukseskan pilpres 2014 terletak pada simbol keagamaan dalam sarana untuk mendapat dukungan dari masyarakat.⁵

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada strategi komunikasi politik yang digunakan terletak pada

⁴Jiddatun Nihayah,” *Strategi Komunikasi Penggelangan Dana Sosial Sedekah Rombongan Melalui Instagram*” (Skripsi Sarjana : Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Ilam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 89

⁵Hasan Ma’ali, “*Strategi Komunikasi Politik Kiai dalam Sukses Pilpres 2014 (Studi di Desa Gardu Barat Kecamatan Gading Kabupaten Sumenep Madura)*” (Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 107

simbol keagamaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Dua Tahap

Konsep komunikasi dua tahap (*two step flow of communication*) pada awalnya berasal dari Paul Felix Lazarsfeld Bernard Berelson dan Hazel Gaudet yang berdasarkan pada penelitiannya menyatakan bahwa ide-ide seringkali datang dari radio dan surat kabar yang ditangkap oleh pemuka pendapat (*opinion leaders*) dan dari mereka ini berlalu menuju penduduk yang kurang giat. Hal ini pertama kali oleh Lazarsfeld pada tahun 1940, kemudian dikembangkan oleh Elihu Katz di tahun 1955.

Pada awalnya para ilmuwan berpendapat bahwa efek yang diberikan media massa berlaku secara langsung seperti yang dikatakan oleh teori jarum suntik. Akan tetapi Lazarsfeld mempertanyakan kebenarannya. Pada saat itu, mungkin saja dia mempertanyakan apa hubungan antara media massa dan masyarakat pengguna media massa saat kampanye pemilihan presiden berlangsung. Selain itu keingintahuan Lazarsfeld terhadap apa saja efek yang diberikan media massa pada masyarakat pengguna media massa pada saat itu serta cara media massa menyampaikan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Lazarsfeld memanfaatkan pemilihan umum presiden Amerika pada tahun 1940. Lazarsfeld mencari tahu cara kerja media dalam mempengaruhi opini publik mengenai calon presiden calon presiden Amerika yang berkampanye melalui media. Lazarsfeld dan beberapa rekannya memilih daerah *Erie County di Ohio* serta *Elmira di New York* sebagai tempat penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif pada bulan Mei hingga November 1940. Fokusnya terhadap pengaruh

interpersonal dalam penyampaian pesan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keputusan media dibuat. Ternyata ditemukan hal yang sangat menarik bahwa hanya 5% responden yang mengaku bahwa mereka mengalami perubahan sikap setelah melihat pesan media secara langsung. Selebihnya pemilih mengatakan bahwa hal yang sedikit banyak berpengaruh dalam pembuatan opini mereka adalah interaksi dengan orang terdekat seperti keluarga atau teman.

Setelah melakukan observasi terhadap responden, Lasarsfeld kemudian menemukan kesimpulan yang sedikit bertolak belakang dengan apa yang diyakini sebelumnya. Hal yang ditemukan Lasarsfeld bahwa terdapat banyak hal yang terjadi saat media massa menyampaikan pesannya. Cara kerja media massa dalam mempengaruhi opini masyarakat terjadi dalam dua tahap. Disebut dua tahap karena model komunikasi ini dimulai dengan tahap pertama sebagai proses komunikasi massa, yaitu sumbernya adalah komunikator kepada pemuka pendapat. Kedua, sebagai proses komunikasi antarpersonal, yaitu dimulai dari pemuka pendapat kepada pengikut-pengikutnya. Peroses tersebut bisa digambarkan sebagai media massa-pesan-opinion leader-followers.⁶

Menurut peneliti teori dua tahap yaitu teori yang menggunakan dua tahap, dimana tahap pertama media massa kepada pemuka pendapat (*Opini Leader*). Pemuka pendapat (*Opini Leader*) merupakan tokoh masyarakat yang dipercaya untuk menyampaikan informasi dan pendapatnya kepada masyarakat dan tahap kedua yaitu pemuka pendapat menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas atau pengikut-pengikutnya.

⁶Daryanto, *Teori Komunikasi*, (Cet. I; Gunung Samudera, 2014) h. 133

2.2.2 Teori Agenda Setting

E.M., Griffin (2003) menyatakan, bahwa Mc Combos dan Donald Shaw meminjam istilah “agenda *setting*” dari sarjana ilmu politik Bernard Cohen (1963) melalui laporan penelitiannya mengenai fungsi khusus media massa. Dalam penelitiannya itu Cohen mengemukakan pertanyaannya yang terkenal yang sering disebut sebagai mantara dari agenda *setting*.

The mass media may not seccessfeul in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think abaout.”(media massa mungkin tidak berhasil mengatakan kepada kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka sangat berhasil untuk mengatakan kepada kita hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan).

Agenda *Setting* terjadi karena media massa sebagai penjaga gawang informasi (*gatekeeper*) harus selektif dalam menyampaikan berita. Media harus melakukan pilihan mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang diketahui publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu sebgaiian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang dilakukan media massa. Dalam hal ini agenda *setting* dapat dibagi kedalam dua tingkatan (level).

Agenda *setting* level pertama adalah upaya membangun isu umum yang dinilai penting, dan level kedua adalah menentukan bagian-bagaian atau aspek-aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting. Level kedua sama pentingnya dengan level pertama. Level kedua penting karena memberitahu kita mengenai bagaimana cara membingkai isu, atau melakukan *freming* terhadap isu, yang akan menjadi agenda media dan juga agenda publik. Misal, media mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis sebagai hal yang penting (level pertama), tetapi media juga menyatakan bahwa tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat mudah terjebak

praktik politik uang (*money politic*), dalam hal ini media membingkai isu mengenai bagaimana mencapai pemilu yang demokratis (level kedua).⁷

Menurut peneliti teori agenda setting berfokus bagaimana menciptakan kesadaran publik dan isu-isu umum yang dinilai penting untuk masyarakat, jadi media harus selektif dalam menyampaikan berita.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian pemilu

Pemilihan adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara *persuasive* atau tidak memaksa. Hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dll. Meskipun agitasi dan propaganda di negara-negara demokratis sangat dikritik, dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda juga banyak digunakan oleh kandidat atau politisi sebagai komunikator politik.

Pemilihan adalah bentuk manifestasi atau perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana rakyat sangat menentukan proses pemilihan dengan memberikan suara secara langsung dalam suatu wilayah. Dalam pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, asas pemilu LUBER (Lansung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) yang harus menjadi pondasi yang kuat dalam pelaksanaan pemilu.⁸ Dalam Al- Qur'an telah dituliskan Q.S:An-Nahl / 50 : 90.

⁷Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Cat. I; Jakarta; Kencana, 2013), h. 494

⁸Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, h. 85

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, Dia melarang melakukan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁹

Dalam ayat diatas di jelaskan bahwa Allah menyuruh manusia untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan bersosial. Seperti halnya landasan yang diambil dalam asas kepemiluan berlaku adil pada semua masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Surbakti disebutkan bahwa pemilu sebagai instrumen dirumuskan sebagai: 1. mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat, 2. Mekanisme perubahan politik menyangkut pola dan arah kebijakan publik, dan mengenai sirkulasi elit secara berkala dan tertib, 3. Mekanisme pemindahan berbagai perbedaan dan konflik menarik dari masyarakat ke lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.¹⁰

Tujuan pemilihan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan dengan tujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat dukungan kuat dari rakyat. Sehingga mereka mampu menjalankan fungsi

⁹Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Al- Jamanatu' Ali, 2004) h. 278

¹⁰Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,(Cet: I ; Jakarta : Kencana, 2018), h. 2

negara kekuasaan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.¹¹

Asas pemilu menurut Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. Langsung

Langsung artinya pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

b. Umum

Pemilihan yang bersifat umum yaitu, pemilihan yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memiliki hak menggunakan suara tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi.

c. Bebas

Artinya masyarakat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari pihak manapun, pemilih bebas memilih calon pemimpin terbaik menurut mereka. Hal ini merupakan hak yang sangat dilindungi dalam masyarakat demokrasi karena satu suara saja akan sangat berpengaruh dalam hasil pemilu.

d. Rahasia

Artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan tertutup dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun kecuali pemilih itu sendiri. Pentingnya pemilu yang bersifat rahasia adalah untuk menghindari konflik karena perbedaan pendapat antara pemilih satu dengan pemilih yang lain.

¹¹Sugianto, *Ilmu Negara : Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama), 2018), h.133

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pelaksana, pemerintah dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, pengawas dan pengamat pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus jujur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku .

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.3.2 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka dan lain-lain.¹²

Menurut I. Hovland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication in the process to modify the behavior of the individuals*). Sementara itu, menurut William Albig (dalam Djoernasih,1991: 16), komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna di antara individu-individu (*communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals*); dan menurut Bernard Berelson dan Barry A. Stainer (dalam Effendy, 1992:48), komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan bahasa, gambar-gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain.

¹²Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Cet. I; Jakarta Barat: Graha Ilmu, 2009), h. 2

Komunikasi politik merupakan proses pengalihan pesan, (berupa data, fakta, informasi, atau citra), yang mengandung suatu arti dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan (*power*), kewenangan (*authoriy*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

“Menurut Rusdi Kantaprawira (1993) yang dikutip oleh Mahi M. Hikmat menyebutkan bahwa komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas berkomunikasi sebagai pelaku kegiatan politik.komunikasi politik dibagi dalam dua dimensi, yakni (1) sebuah kegiatan politik: pennyampaian pesan –pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain; (2) kegiatan ilmiah: berkegiatan politik dalam sistem politik”.¹³

Menurut peneliti dari pendapat di atas mengenai komunikasi politik dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan komunikasi yang terkait dengan pesan-pesan politik, aktor-aktor politik, kegiatan politik, kekuasaan politik negara, kebijakan pemerintah dan pemerintahan.

Untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat diperlukan sebuah strategi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Jadi strategi komunikasi mampu menunjukkan bagaimana operasional yang dilakukan dilapangan serta menyusun

¹³Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktek, (Dalam Pilkada Lansung)*, (Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 36

strategi yang akan digunakan pada awal sampai akhir agar strategi yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar.¹⁴

2.3.3 Strategi Komunikasi

Strategi merupakan jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan tujuan. Strategi dan taktik adalah jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Singkatnya, strategi adalah konsep yang merujuk pada jaringan pemikiran, gagasan, pemahaman yang mendalam, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi, dan harapan yang memandu untuk membangun kerangka pikir yang sama sehingga kita dapat memutuskan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan.¹⁵

Strategi ini pada dasarnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, strategi tersebut tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Begitu juga dengan strategi komunikasi yang merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Strategi komunikasi ini harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya harus dilakukan secara praktis, bahwa pendekatannya dapat bervariasi setiap saat tergantung pada situasi dan kondisi.

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, *Techniques For Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: Pertama, *To secure*

¹⁴ Onong Uchajana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Cet. VI; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 29

¹⁵ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 239

understanding, yaitu memastikan bahwa komunikasi mengerti pesan yang diterimanya. Kedua, *To establish acceptance*, yaitu apabila komunikasi sudah dapat mengerti dan menerima pesan, maka penerima pesan tersebut harus dibina. Ketiga, *To motivate action*,¹⁶ yaitu setelah penerima pesan tersebut dibina maka kegiatan itu harus dimotivasi.

2.3.4 Komponen-Komponen Strategi

Mengembangkan strategi komunikasi membutuhkan pemikiran dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat, akan lebih baik jika strategi komunikasi juga mempertimbangkan komponen komunikasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat untuk masing-masing komponen. Mulai berturut-turut dari komunikasi sebagai target komunikasi, media, pesan dan komunikator.

2.3.4.1 Mengenali Sasaran Komunikasi

Sasaran komunikasi tergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikasi hanya untuk mengetahui (metode informatif) atau sehingga komunikasi mengambil tindakan tertentu (persuasif atau metode instruktif). Apapun tujuan, metode, dan jumlah tujuan, komunikasi harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

2.3.4.1.1 Faktor kerangka referensi

Isi pesan yang disampaikan kepada komunikasi harus sesuai dengan kerangka referensi (*frame of reference*). Kerangka referensi semua orang akan berbeda dari yang lain. Seseorang terbentuk dalam diri mereka sebagai perpaduan pengalaman, pendidikan, norma kehidupan, status sosial, ideologi dan sebagainya.

Situasi komunikasi interpersonal lebih mudah untuk mengenali kerangka referensi komunikasi karena dia hanya satu orang, sehingga komunikasi antar pribadi dapat dengan mudah ketika dia ingin bertanya tentang identitasnya, yang sulit adalah

¹⁶Onong UchjanaEffendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Cet. XXI ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), h. 32

mengenal kerangka referensi komunikan dalam komunikasi kelompok. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga lebih sulit untuk mengenal kerangka acuan komunikan dalam komunikasi massa, yang penyebabnya heterogen. Sifat heterogen menyebabkan pesan yang disampaikan kepada publik melalui media massa hanya bersifat informatif dan umum, yang dapat dipahami oleh semua orang, dan pada hal-hal yang menyangkut kepentingan semua orang.

2.3.4.1.2 Faktor situasi dan kondisi

Situasi dalam hal ini adalah situasi komunikasi ketika komunikan akan menerima pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Situasi yang dapat menghambat jalannya komunikasi dapat diprediksi tetapi juga dapat datang secara tiba-tiba ketika komunikasi dilakukan. Hambatan dalam komunikasi dapat terjadi kapan saja, sehingga seorang komunikator hanya mampu mengatasi ketika hambatan ini datang tiba-tiba atau dapat diprediksi.

Kondisi dalam hal ini adalah keadaan kepribadian komunikan, yaitu kondisi fisik komunikan yang menerima pesan komunikasi. Tidak efektif jika komunikan menerima pesan dalam keadaan sedih, marah, sakit dan sebagainya. Sehingga dalam menyampaikan pesan kepada komunikan, komunikator harus menunggu sampai kondisi komunikan berubah menjadi menyenangkan.

2.3.4.2 Pemilihan Media Komunikasi

Pilihan media komunikasi merupakan salah satu bentuk pencapaian tujuan komunikasi. Cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih satu atau beberapa media yang akan digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Pilihan

media tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan digunakan.

Media komunikasi yang sangat banyak tidak dapat dikonfirmasi dengan pasti media mana yang terbaik dan paling tepat, karena masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, media cetak dan media visual dapat ditinjau berulang kali dan disimpan sebagai dokumentasi. Sementara media audio hanya bisa didengar, dan pesan melalui media audio visual bisa ditangkap secara penuh, yang bisa dilihat dan didengar.

2.3.4.3 Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Setiap pesan komunikasi yang akan disampaikan selalu memiliki tujuan tertentu. Seorang komunikator dapat menggunakan teknik tersebut sehingga suatu pesan dapat disampaikan sesuai dengan tujuannya. Beberapa teknik ini adalah informasi, teknik persuasi atau teknik pengajaran.

Isi pesan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak disampaikan kepada komunikan dengan menggunakan kombinasi simbol (lambang), seperti pesan komunikasi melalui surat kabar, film atau televisi. Simbol yang paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah bahasa, karena hanya bahasa yang dapat mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan pendapat, hal-hal konkret dan abstrak, pengalaman masa lalu dan kegiatan mendatang, dan sebagainya.

Karena itu komunikasi dalam bahasa memainkan peran yang sangat penting. Tanpa penguasaan bahasa, pesan komunikasi tidak akan disampaikan kepada orang

lain dengan baik. Akan ada banyak kesalahan informasi dan kesalahan intepetasi yang disebabkan oleh bahasa.¹⁷

2.3.4.4 Peranan Komunikator Dalam Komunikasi

Ada faktor yang penting pada diri komunikator bila ia melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik sumber (*source attractiveness*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*).

2.3.4.4.1 Daya tarik sumber

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikan melalui mekanisme tarik-menarik jika komunikan merasa komunikator ikut serta dengannya. Dengan kata lain, komunikan merasa ada kesamaan antara komunikator dan komunikan yang mau mematuhi isi pesan yang disampaikan oleh komunikator.

2.3.4.4.2 Kredibilitas sumber

Faktor kedua yang dapat menyebabkan komunikasi yang sukses adalah kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini sangat terkait dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Seorang dokter akan mendapatkan kepercayaan jika ia menjelaskan tentang kesehatan. Seorang petugas polisi akan mendapatkan kepercayaan jika ia membahas masalah keamanan dan ketertiban umum. Seorang duta besar akan mendapatkan kepercayaan jika ia berbicara tentang situasi internasional.

¹⁷Onong UchjanaEffendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Cet. I ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 40

Berdasarkan dua faktor ini, seorang komunikator dalam menghadapi komunikan harus empatik (empati), yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya ke peran orang lain. Dengan kata lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang komunikator harus menjadi empati ketika berkomunikasi dengan komunikan yang sedang sibuk, marah, bingung, sedih, sakit, kecewa, dan sebagainya.¹⁸

2.3.5 Fungsi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah hal yang penting dalam proses komunikasi, strategi komunikasi dilakukan untuk membuat komunikasi berhasil sehingga pesan atau informasi dapat disampaikan sesuai dengan tujuannya. Keberhasilan atau kegagalan kegiatan komunikasi yang efektif sangat ditentukan oleh strategi komunikasi.

Strategi komunikasi memiliki beberapa fungsi baik secara makro (*Planned multimedia Strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) di antaranya adalah :

- a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
- b. Menjabatani “kesenjangan budaya” (*cultural group*) akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

¹⁸Onong UchjanaEffendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Cet. XXI ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 39

2.3.6 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara biasa dalam mempengaruhi proses umum pembuatan dan implementasi dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud meliputi, meminta tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi terhadap implementasi kebijakan umum, dan mendukung dan menentang para pemimpin tertentu, mengusulkan pemimpin alternatif, dan memilih perwakilan dalam pemilihan umum.

Partai politik memiliki fungsi untuk membuka peluang, mendorong dan mengundang anggota masyarakat lainnya untuk menggunakan partai politik sebagai kegiatan yang mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik adalah forum untuk partisipasi politik. Fungsi ini memiliki fungsi yang lebih tinggi dalam sistem politik demokratis daripada dalam sistem politik totaliter karena sistem politik yang terakhir mengharapkan kepatuhan atau ketaatan dari warga negara daripada kegiatan independen atau aktifitas mandiri.¹⁹

Pendapat yang dikemukakan Surbakti mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu :

2.3.6.1 Partisipasi aktif

Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik. Termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengusulkan kebijakan umum, mengusulkan berbagai kebijakan alternatif dengan kebijakan yang dibuat oleh

¹⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992). H. 118

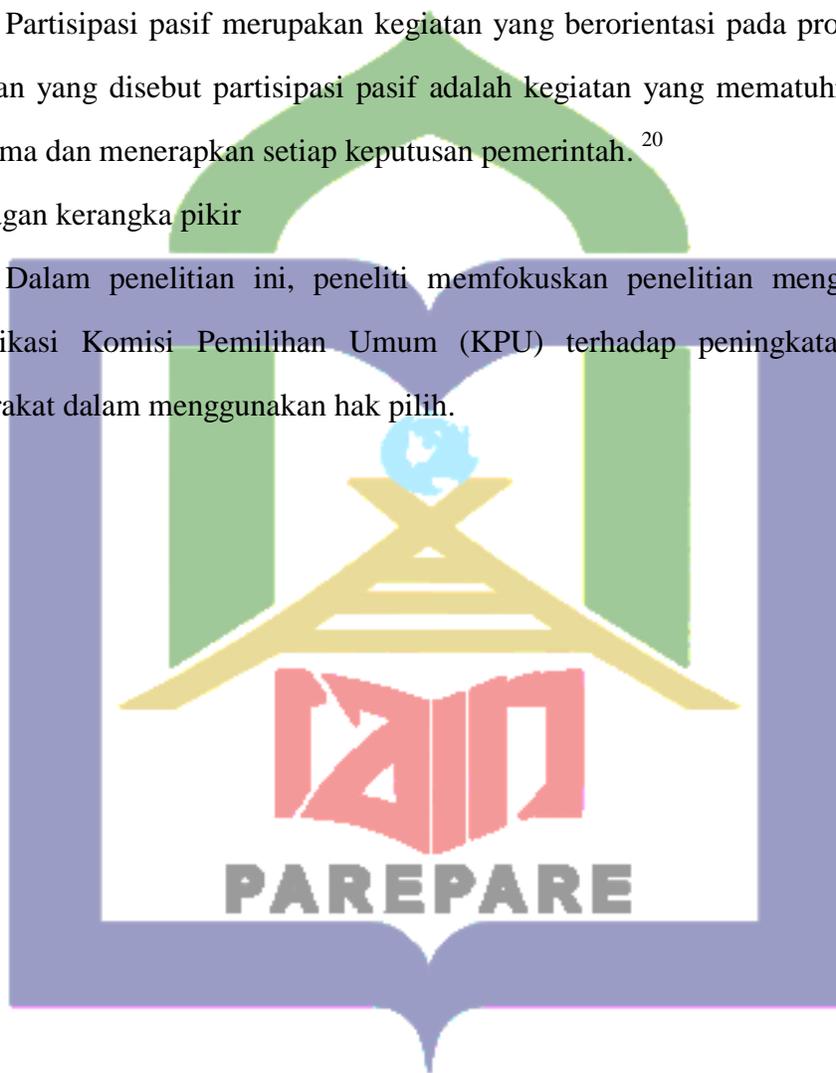
pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk memperbaiki kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan.

2.3.6.2 Partisipasi pasif

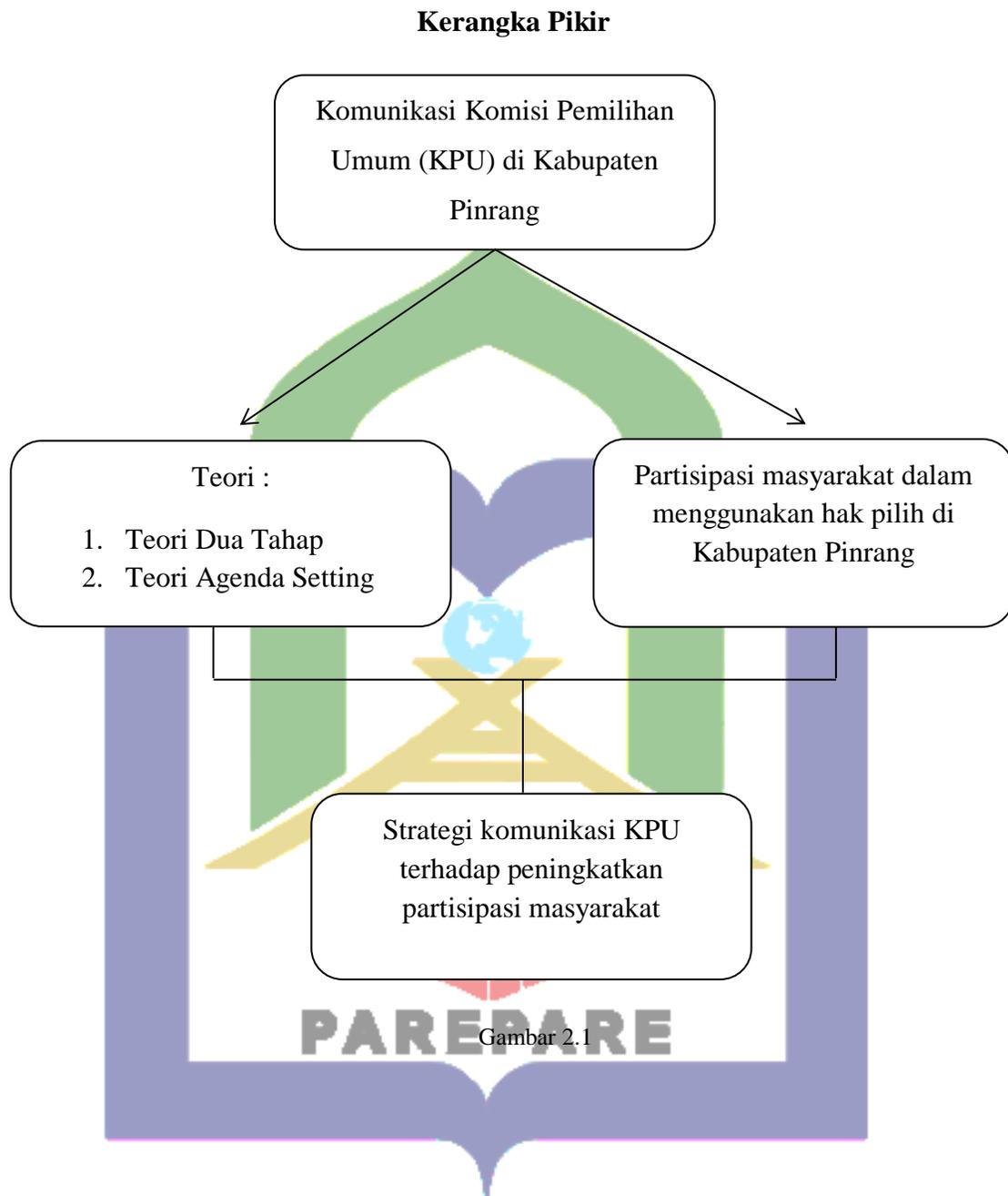
Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses keluaran. Kegiatan yang disebut partisipasi pasif adalah kegiatan yang mematuhi pemerintah, menerima dan menerapkan setiap keputusan pemerintah.²⁰

2.4 Bagan kerangka pikir

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.



²⁰Rahmawati Halim dan Muhalin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik* (Cet. I;Makassar: CV Sah Media, 2016), h. 99



Gambar 2.1

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tertulis dan perilaku yang dapat diamati dari orang yang diteliti.²¹ Studi deskriptif yang akan mendeskripsikan secara deskriptif tentang strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pinrang, penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan dari segi waktu dan jarak yang ditempuh, maka daerah tersebut memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya dan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sedangkan data

²¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk buku, catatan atau arsip yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan.

Menurut Lofland, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan sisa tindakan di samping dokumen dan lainnya. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yang meliputi kegiatan penelitian perpustakaan dan studi lapangan.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian.²² Dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan wawancara terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang, peneliti mewawancarai Ketua Komisioner KPU Ketua Divisi sosialisasi terkait upaya dan strategi komunikasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan, studi dokumentasi atau dari penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.²³

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi tentang strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, sehingga penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, dimana teknik dan

²²Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 14

²³Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 65

instrumen saling memperkuat satu sama lain sehingga data yang diperoleh dari lapangan valid.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data secara pengamatan langsung dengan menggunakan pendengaran dan penglihatan.²⁴ Penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian tetapi observasi non-partisipan, di mana penulis harus mengamati tetapi tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

3.5.2 Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁵ Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu, Ketua Komisioner KPU, Ketua divisi sosialisasi, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Relawan Demokrasi dan masyarakat.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat langsung dokumen atau arsip tertulis yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

²⁴ Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, h. 267

²⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), h. 113

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangatlah dibutuhkan, bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan.²⁶

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan atau informan yang telah dipilih untuk mencari informasi yang valid tentang masalah yang diteliti

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁷ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.6.2 Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

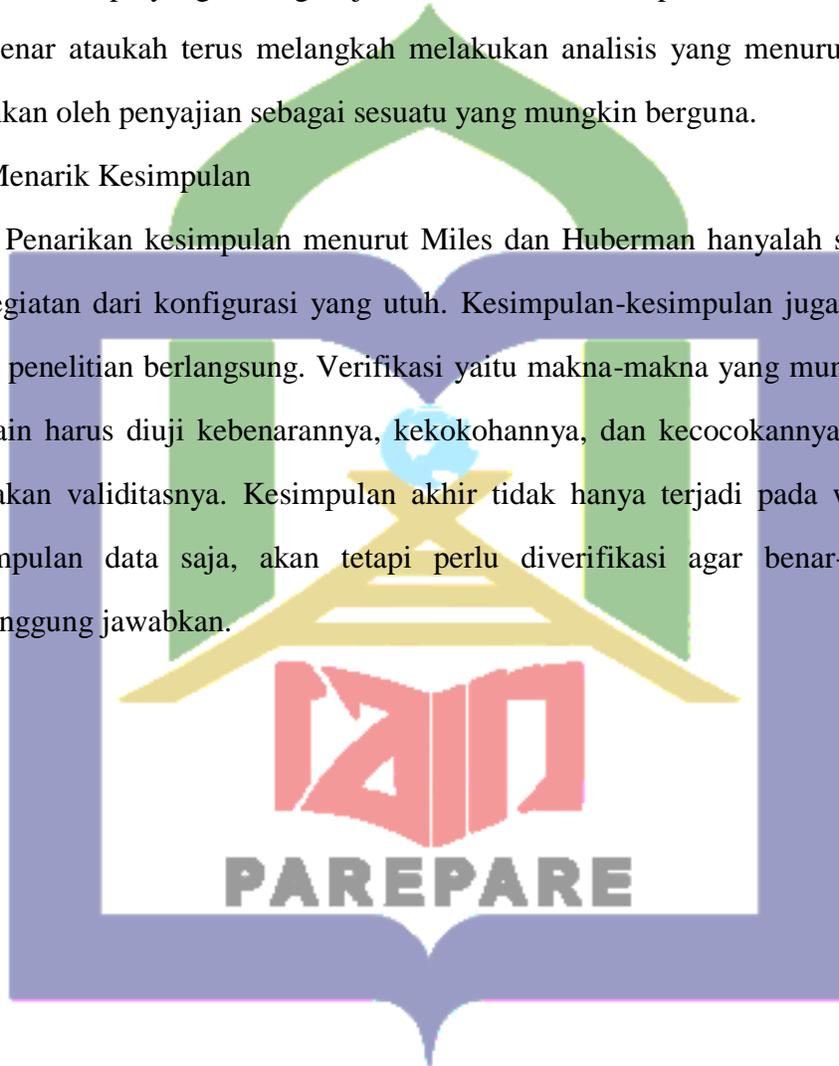
²⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Cet.III; Malang UNISMUH Malang, 2005), h. 15

²⁷Miles dan Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). h.16

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi : berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3.6.3 Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi yaitu makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri seperti halnya KPU yang ada di daerah lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang bertempat di Jl. Bintang, Maccorawalie, Wattang Sawitto Kab. Pinrang dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang dasar No. 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis²⁸ sehingga penyelenggaraan pemilu harus berkomitmen dan berpedoman pada azas LUBER(Lansung, Umum, Bebas dan Rahasia) JURDIL (Jujur dan Adil).

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi

²⁸ Ni'matul Huda & Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Cet. I. Jakarta: Kencana, 2017), h. 93

terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.²⁹

4.1.3 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)

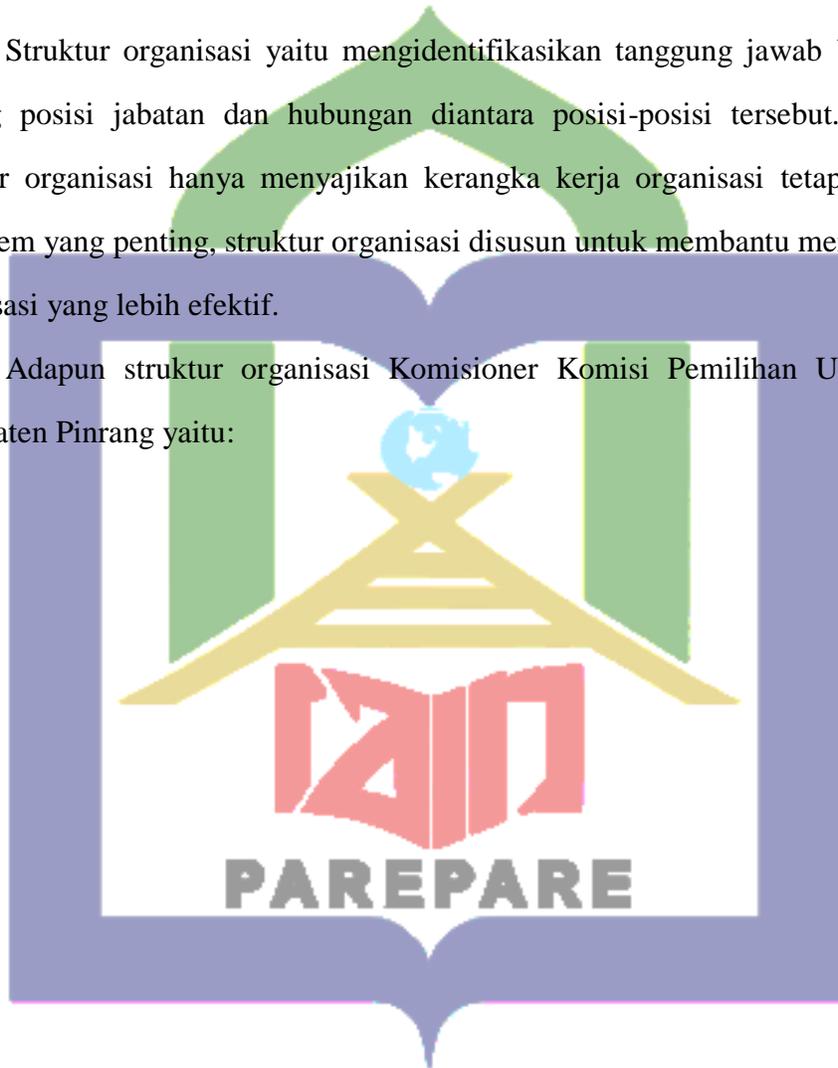
Organisasi adalah sekelompok orang pemegang posisi yang harus dikordinasikan. Tersusun dari sejumlah subsistem yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka untuk

²⁹ <https://kpu-pinrangkab.blogspot.com/p/blog-page.html> di akses pada tanggal 30 Agustus 2019

mencapai tujuan tertentu.³⁰ Oleh karena itu, sangat perlu adanya struktur dalam suatu organisasi untuk memberikan gambaran terkait kedudukan tiap orang dalam organisasi, tugas yang dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawab tiap personil.

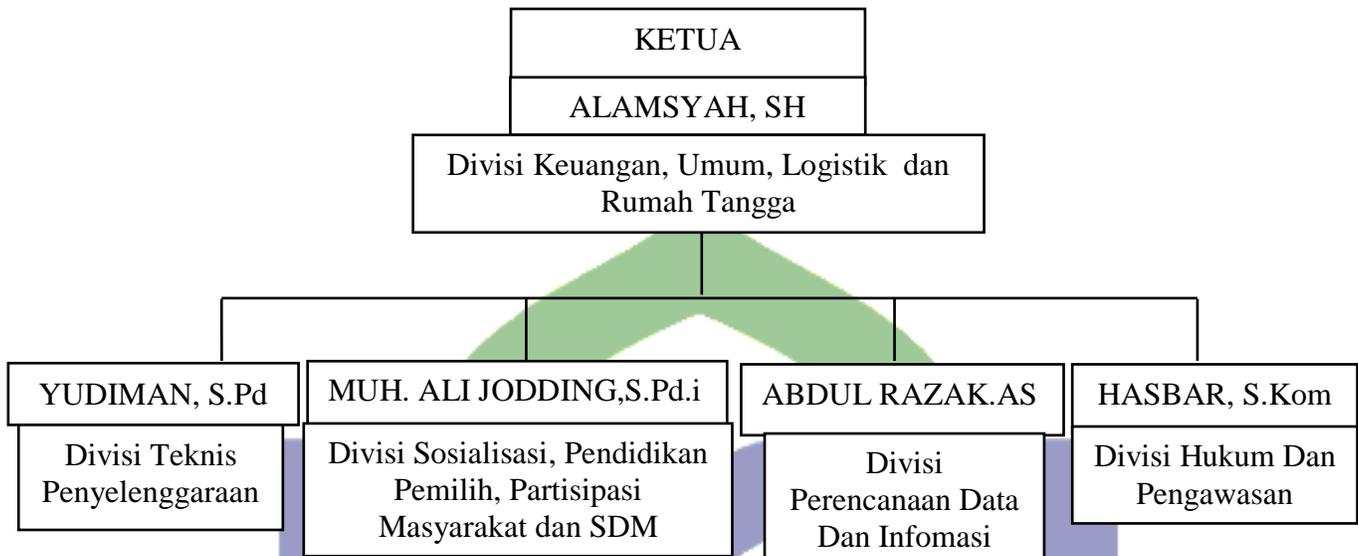
Struktur organisasi yaitu mengidentifikasi tanggung jawab bagi masing-masing posisi jabatan dan hubungan diantara posisi-posisi tersebut.³¹ Meskipun struktur organisasi hanya menyajikan kerangka kerja organisasi tetapi merupakan subsistem yang penting, struktur organisasi disusun untuk membantu mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif.

Adapun struktur organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang yaitu:



³⁰ Timotius Duha, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.1

³¹ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007) h. 444



Gambar. 4.1

Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

Adapun tugas komisioner tiap divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
 - a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 - b. Protokol dan persidangan
 - c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
 - e. Peresmian keanggotaan dan Pelaksanaan sumpah janji Perencanaan,
 - f. pengadaan barang dan jasa distribusi logistik pemilu
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
 - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - b. Verifikasi partai politik dan DPD
 - c. Pencalonan peserta pemilu

- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan
 - f. Pelaporan dan kampanye
 - g. PAW anggota DPRD
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat
 - a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye pemilu dan komunikasi
 - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi
 - f. Kerjasama antar lembaga
 - g. PAW anggota KPU Kabupaten
 - h. Rekrutme badan Adhoc
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kerja SDM
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - k. Diklat dan pengembangan SDM
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan SDM
 4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 - a. Penyusunan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu

- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
- g. Pengelolaan informasi
- h. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
- i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan
 - a. Pembuatan rancangan keputusan
 - b. Telaah dan advokasi hukum
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal
 - e. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu
 - f. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

4.1.4 Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum
- c. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai ditempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS

- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR,DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilih
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
- f. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Dalam pasal 2 keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

- a. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.³²

³² <https://kpu-pinrangkab.blogspot.com/p/blog-page.html> di akses pada tanggal 30 Agustus 2019

4.1.5 Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Adapun data pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Pinrang sebagai berikut:³³

Tabel 4.1
Daftar Pemilih

No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah pemilih DPT		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Patampanua	11	10,958	12,091	23,049
2	Suppa	10	10,815	11,452	22,267
3	Mattiro Bulu	9	10,052	10,757	20,809
4	Wattang Sawitto	8	16,549	18,757	34,914
5	Mattiro Sompe	9	9,230	10,287	19,517
6	Duampanua	15	15,795	16,923	32,718
7	Lembang	16	16,651	16,783	33,434
8	Cempa	7	5,925	6,480	12,405
9	Tiroang	5	7,502	7,831	15,333
10	Lanrisang	7	6,202	6,909	13,111
11	Paleteang	6	12,407	13,460	25.867
12	Batulappa	5	3,687	3,693	7,380
	Total	108	125.773	135.031	260.804

³³ Data diambil dari dokumentasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

4.2 Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang

4.2.1 Sosialisasi

Menurut Cheppy Haricapyono istilah sosialisasi pada umumnya digunakan pada ahli-ahli ilmu sosial untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak atau generasi lebih muda diperkenalkan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak jika sudah dewasa.” Sedangkan sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang mana menurut Joko J Prihatmoko adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik serta partisipasi politik rakyat.”³⁴

Sosialisasi merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk dapat memberikan hak masyarakat akan informasi Pilkada, sosialisasi bertujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Kegiatan akan di mulai pada tanggal 29 Agustus 2017 sampai 26 Juni 2018.

Dalam melakukan sosialisasi tatap muka KPU Kabupaten Pinrang serta anggotanya terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, juga mengadakan kegiatan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada seperti launching maskot, jalan santai, debat pilkada bagi SMA dan sederajat, dalam kegiatan tersebut juga memberikan informasi mengenai Pilkada serta menyampaikan visi dan misi tiap calon. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh

³⁴ Dedi Amrizal dkk, *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*, (Cet. I; Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Alqi, 2018) h. 39

peneliti kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kita melakukan sosialisasi secara massif dikalangan masyarakat, seperti kita masuk ke sekolah-sekolah untuk menyasar pemilih pemula, komisioner banyak menebar senyum ke masyarakat agar masyarakat tertarik untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemarin kita ada launching maskot, karena kita mau sentuh sekmen-sekmen yang era sekarang, selain itu kita adakan grebek pasar untuk sosialisasi dan KPU juga di tugaskan ke kampung-kampung atau daerah terpencil ini juga dilakukan secara massif, KPU juga ada perpanjangan tangan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) itu semua bergerak mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.”³⁵

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk menyampaikan informasi terkait tahapan penyelenggaraan kepada khalayak yang menjadi sasaran sosialisasi. Sasaran komunikasi saat melaksanakan sosialisasi yaitu semua elemen masyarakat, mulai dari basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih marginal, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis komunitas, basis keagamaan, bahkan juga memperkenalkan Politik kepada anak-anak. Komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi adalah mengintegrasikan sikap, berbagai strategi tersebut yaitu, publikasi media, komunikasi tatap muka dan mobilisasi sosial yang tidak hanya melibatkan KPU dan Relawan Demokrasi tapi juga seluruh stakeholder yang ada seperti Camat, Organisasi Mahasiswa, Tokoh Agama, serta PPK dan PPS agar kegiatan berjalan secara massif serta menjangkau semua masyarakat. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

³⁵ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

“Seluruh elemen, mulai dari orang buta huruf, orang cacat (Disabilitas) sampai orang yang berpendidikan, bahkan kita bangun komunikasi dengan stekholder-stekholder yang ada yang berkepentingan contohnya camat, kepala desa, kepala dinas, Ormas Relawan Demokrasi.”³⁶

Dalam sosialisasi Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan Komvoi keliling kampung untuk mengingatkan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pinrang serta mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah di tempel ditiap Desa/ Kelurahan masing-masing . Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada anggota PPS Susilawati M. Pd. I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Pilkada ini adalah salah satu momentum paling penting, pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang yang hanya ada 5 Tahun sekali. PPK dan PPS melakukan Komvoi untuk mengingatkan masyarakat untuk hadir memilih, Sehingga kami berharap agar warga Bumi Lasinrang ini dapat berpesta dengan cara menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan sebab 5 menit di bilik suara menentukan nasib Daerah hingga 5 tahun kedepan. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilih, sebab bagi pemilih yang disabilitas, boleh dibantu oleh keluarga ataupun petugas KPPS sedangkan bagi mereka yang sakit dan tidak dapat mendatangi TPS, KPU tetap memberi kesempatan yaitu dengan cara petugas KPPS beserta saksi dapat membawakan surat suara di rumah mereka, tentunya dengan pengawasan dan pengawalan PTPS dan Tim keamanan.”³⁷

Di Negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di Negara yang sudah maju demokrasinya sekalipun, Golput merupakan fenomena dalam demokrasi. Golput selalu ada pada setiap pesta demokrasi dimanapun terutama yang menggunakan sistem pemilihan secara langsung. Adapun alasan masyarakat tidak

³⁶ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

³⁷ Wawancara dengan Susilawati, Anggota PPS Watang Pulu, tanggal 20 November 2019

berpartisipasi dalam Pilkada, diwawancarai oleh peneliti dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya melihat informasi di media sosial KPU Kabuapten Pinrang bahwa akan dilaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 27 Juni 2018, saya tidak ikut berpartisipasi karena saya berada di Makassar, apalagi jarak Makassar ke Pinrang agak jauh dan isin yang diberikan oleh kantor hanya 1 hari yaitu pada hari pemilihan .”³⁸

Adapun harapan KPU Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggara yang diungkapkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.i dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Seluruh yang terdaftar di DPT kita harapkan semua hadir untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan kalau ada yang tercecceh, tidak terdaftar masih kita berikan ruang untuk memilih, yang penting masih warga disini. Walaupun ada yang tidak datang memilih itu factor individu masing-masing, jadi tidak ada sama sekali dihalangi untuk memilih ”.³⁹

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa golput merupakan hak setiap orang untuk berpartisipasi dan memiliki alasan tersendiri untuk memilih golput, masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada karena faktor pekerjaan dan pemilih yang berada di luar kota menjadi pertimbangan yang sangat sulit untuk ditinggalkan mengingat pekerjaan yang sedang dijalannya menuntut agar mereka tetap hadir meskipun ada pesta demokrasi yang berlangsung. Berbagai upaya yang dilakukan KPU agar masyarakat ikut serta dalam pesta demokrasi tetapi kembali lagi kepada masyarakat apakah ingin menggunakan hak pilihnya atau tidak.

³⁸ Wawancara dengan In Lidya, masyarakat Watang Pulu Kec. Suppa, tanggal 18 November 2019

³⁹ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

4.2.2 Pemilihan Media Komunikasi dalam Sosialisasi

Pilihan media komunikasi merupakan salah satu bentuk pencapaian tujuan komunikasi. Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu gabungan dari beberapa media, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.⁴⁰ Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Pinrang dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, merupakan hal yang penting terhadap peningkatan partisipasi pemilihan yaitu menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial, sangat diperlukan untuk menjelaskan serta memberikan informasi kepada masyarakat luas tanpa harus bertemu langsung dengan mereka.

1. Media Audio (Radio)

Media komunikasi audio yang digunakan KPU dalam melakukan sosialisasi terkait Pilkada tahun 2018 adalah radio swasta yaitu radio susia yang pendengarnya mayoritas masyarakat Pinrang, media ini digunakan untuk menyiarkan informasi terkait Pilkada. Adapun acara yang disiarkan di radio yaitu talkshow yang diisi oleh ketua komisioner dan ketua divisi sosialisasi sebagai narasumber, masyarakat juga dapat berinteraksi dan berdiskusi dalam acara tersebut melalui telpon saat acara tersebut sedang berlangsung. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti

⁴⁰ Onong UchjanaEffendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Cet. XXI ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), h. 37

kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Acara talkshow dalam bentuk live diharapkan dapat menambah wawasan para masyarakat arti pentingnya untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada, selain itu juga mengajak masyarakat untuk tidak terperdaya dengan iming-iming money politik yang dapat mencederai esensi Pilkada sendiri.”⁴¹

2. Media Cetak

KPU Kabupaten Pinrang membuat spanduk, reklame, poster sebagai bahan sosialisasi yang akan disebar ke masyarakat dan ditempelkan pada tempat-tempat tertentu yang strategis untuk memberikan informasi terkait Pilkada ke masyarakat. Adapun informasi sosialisasi berupa himbuan untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, selain itu menginformasikan tentang apakah masyarakat sudah terdaftar di DPT, lawan politik uang, dan agar masyarakat tidak golput dalam pemilihan.

3. Media social

Media social adalah sebuah wadah untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di media social, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, dan berbagai kegiatan lainnya. KPU Kabupaten Pinrang menggunakan Media social untuk sosialisasi pilkada yang dimuat di website resmi KPU dan facebook yang berisikan tentang informasi terkait Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Sosialisasi melalui media sosialisasi lebih menargetkan kepada calon pemilih yang sudah mengerti akan teknologi, terutama pemilih pemula dan pemilih muda yang lebih banyak menggunakan media sosial. Hasil wawancara yang

⁴¹ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

telah dilakukan oleh peneliti kepada Alamsyah. SH, Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kita gunakan semua media dalam sosialisasi, seperti iklan di media cetak, media sosial, radio tujuannya itu bahwa kita mau gemahkan kepemiluan ini di masyarakat. Komisi pemilihan Umum (KPU) berpartisipasi dalam kegiatan talkshow dan keagamaan seperti mengucapkan selamat berbuka puasa di radio. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Kabupaten Pinrang untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.”⁴²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggara pemilu tidak tinggal diam dalam menanggapi perkembangan teknologi yang mana menggunakan media untuk mengambil simpati dan mendidik masyarakat terutama anak muda terkait dengan pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU dalam sosialisasi merupakan hal yang sangat penting terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, penggunaan media seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial, untuk memberikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat luas, Tidak hanya menggunakan media saja tapi juga mengerahkan anggota KPU untuk terjun langsung untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

⁴² Wawancara Alamsyah, Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga tanggal 18 September 2019

4.3 Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Pinrang

Strategi merupakan jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan tujuan. Strategi dan taktik adalah jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat yaitu:

4.3.1 Membentuk Relawan Demokrasi

KPU Pinrang dalam melakukan sosialisasi juga membentuk relawan demokrasi yang digaji tiap bulannya untuk membantu KPU dalam sosialisasi. Program Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelapor demokrasi bagi komunitasnya. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara optimal.⁴³

Segmentasi tersebut dilakukan dengan kesadaran tidak semua komunitas dapat dijangkau oleh Program KPU Kabupaten Pinrang dan diharapkan para Relawan Demokrasi dapat membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, Relawan Demokrasi di Kabupaten Pinrang sebanyak 25 orang yang direkrut seluruh perwakilan kecamatan. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh KPU juga melalui media yang memberikan arahan kepada Relawan

⁴³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kabupaten Pinrang, h. 1

Demokrasi terkait tentang sosialisasi yang akan dilakukan. hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi di masyarakat, melakukan sosialisasi dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Relawan demokrasi ini dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten Pinrang untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih. KPU Pinrang tidak sepenuhnya angkat tangan dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih dan melimpahkan ke relawan demokrasi tapi tetap melakukan sosialisasi dan dibantu oleh relawan demokrasi. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Alamsyah, SH Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Strategi komunikasinya adalah membentuk Relawan Demokrasi yang kita gaji tiap bulannya oleh KPU. Tujuannya yaitu membangun komunikasi di masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat serta membangun meningkatkan kerjasama dengan stekholder seperti OKP, Ormas, komunitas, PPK dan PPS dengan stekholder yang lain .”⁴⁴

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Pinrang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 7 basis pemilih yaitu: basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis keagamaan, basis pemilih penyandang disabilitas dan basis komunitas, dan basis pemilih marginal.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya Relawan Demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta

⁴⁴ Wawancara Alamsyah, Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga tanggal 18 September 2019

penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pilkada dapat berjalan dengan baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya.

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas proses Pemilu
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih
- c. Meningkatkan kepercayaan public terhadap proses demokrasi
- d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi

4.3.2.1 Bentuk dan Jenis Kegiatan Sosialisasi KPU dan Relawan Demokrasi

Sosialisasi Pilkada merupakan sebuah proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan social dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. KPU Kabupaten Pinrang terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada, hal yang dilakukan yaitu, sosialisasi untuk 7 basis pemilih dan kegiatan umum seperti launching mascot, gerebek pasar dan jalan santai.

4.3.2.1.1 Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula yaitu mereka yang memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam suatu pemilihan. Dimana pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali, usia pemilih pemula sekitar 17-21 tahun. Umumnya pemilih pemula masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat serta yang ada di perguruan tinggi ataupun mereka yang sudah putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan pemilih pemula.⁴⁵

⁴⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kabupaten Pinrang, h. 6

Sosialisasi yang dilakukan Relawan Demokrasi untuk pemilih pemula yaitu datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pinrang seperti SMAN 4 Pinrang, SMKN 3 Pinrang, SMKN 1 Pinrang, SMKN 4 Pinrang dan beberapa sekolah lainnya. Ini menjadi salah satu target karena pemilih pemula rata-rata kelas XII sudah berusia 17 Tahun karena jumlahnya sangat banyak. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi telah disesuaikan dengan basis pemilih pemula, hal tersebut berorientasi untuk membangun kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi. Selain itu, KPU Kabupaten Pinrang juga melaksanakan kegiatan debat Pilkada antar SMA dan sederajat se-Kabupaten Pinrang, tujuan utama melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih pemula adalah untuk membangun kesadaran kritis sejak dini agar pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya.

Metode sosialisasi yang digunakan pada basis pemilih pemula berupa tatap muka seperti dialog, simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan serta kegiatan debat Pilkada. Metode ini sangat cocok untuk dilakukan karena sasaran sosialisasi itu dari anak muda sehingga sosialisasi yang digunakan oleh KPU dan Relawan Demokrasi juga menyesuaikan dengan basis pemilih pemula agar peserta tidak jenuh, selain itu juga dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan yang benar.

4.3.2.1.2 Sosialisasi dan pendidikan pemilih penyandang disabilitas

Berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁶

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggara pemilu benar-benar sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus mensosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kita datang secara khusus pemilih disabilitas, kita melakukan pendekatan karena jangan sampai mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena kekurangannya karena dia merasa momentum pesta demokrasi ini hanya untuk orang-orang yang sempurna, orang-orang yang hebat padahal tidak, semua memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi”.⁴⁷

KPU Kabupaten Pinrang bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang. Salah satu pameri yaitu ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding. Selain itu, Relawan Demokrasi juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk kelompok disabilitas

⁴⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Kepala Daerah Seretak Tahan 2018 Kabupaten Pinrang, h. 9

⁴⁷ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

yang dilaksanakan 3 kali seminggu yang dilakukan di salah satu rumah warga di Barang Palie Kecamatan Lanrisang, di Salubone Data Kecamatan Duampanua dan sekretariat PPDI Pinrang, materi yang disampaikan terkait dengan urgensi kelompok disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Pinrang. Selain itu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat disabilitas tentang pentingnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam mendukung kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memberikan perlakuan khusus kepada mereka pada saat hari pemilihan.

Sasaran sosialisasi pada segmen ini yaitu seluruh masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Pinrang. Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan karena penyandang disabilitas mempunyai jumlah yang cukup banyak, serta masyarakat disabilitas mempunyai keterbatasan fisik sangat perlu adanya dukungan, motivasi yang lebih untuk mendorong dalam mengikuti Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

4.3.2.1.3 Basis pemilih marginal

Pemilu merupakan ajang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya kepada calon kandidat, tentunya masyarakat memiliki harapan besar bagaimana melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya, anti korupsi, berpihak pada orang yang terpinggirkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat meningkatkan pelayanan public. Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan

fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih marginal diadakan tiga kali dalam satu minggu, yaitu di rumah warga di Ujung Tape Kecamatan Mattiro Sompe yang dihadiri oleh 60 orang, RM. Pondok Rakyat Kecamatan Wattang Sawitto yang dihadiri 100 orang dan RM Ammani Kecamatan Mattiro Sompe yang dihadiri 90 orang. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dengan tatap muka, presentasi dan dialog kepada para masyarakat marginal atau terpinggirkan. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah satu Relawan Demokrasi yaitu bapak Jumadi dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Sosialisasi pada pemilih marginal juga sangat penting karena masyarakat marginal atau terpinggirkan merupakan pemilih yang rawan golput dan juga terpengaruh untuk menerima uang dari calon.”⁴⁸

Materi yang disampaikan terkait dengan ajakan memilih dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018 serta mengingatkan agar masyarakat tidak menerima uang atau money politik. Dari materi tersebut menjelaskan kepada kaum marginal bahwa pentingnya menggunakan hak pilihnya karena sangat menentukan pemimpin kedepannya. Selain itu, menerima uang dari para calon sangat berbahaya karena itu akar akan terjadinya korupsi.

4.3.2.1.4 Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah pemilih muda dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Hal ini di manfaatkan oleh KPU datang ke kampus-kampus yang ada di kabupaten Pinrang

⁴⁸ Wawancara Jumadi, anggota Relawan Demokrasi tanggal 29 Desember 2019

serta bekerjasama dengan organisasi mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih muda. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“ Sosialisasi dan Pendidikan pemilih bagi pemilih muda bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pilkada dan mendorong kesadaran untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.”⁴⁹

Selain itu, Relawan Demokrasi Kabupaten Pinrang juga melakukan sosialisasi di beberapa tempat yaitu pertama, Café Alya Sweetness Parepare bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu silaturahmi dan diskusi terkait dengan Pilkada yang dihadiri 22 mahasiswa. Kedua, Kampus STKIP Cokroaminoto Pinrang, bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu dialog tentang money politik yang di hadiri 46 mahasiswa Pinrang. Ketiga, STIKES Baramuli, bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu menyampaikan materi tentang tahapan Pilkada Pinrang yang diikuti 24 mahasiswa.

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU dan Relawan Demokrasi pada segmen pemilih muda dilakukan secara formal yang dikemas secara menarik sehingga pemilih muda dapat menerima pesan-pesan sosialisasi yang disampaikan. Pendekatan sosialisasi pada segmen ini dikalangan mahasiswa dilaksanakan dengan melakukan pendekatan yang dapat diterima oleh mahasiswa dengan bentuk pertemuan diskusi dan dialog sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan tentang pentingnya menggunakan hak pilihnya pada Pilkada.

⁴⁹ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

4.3.2.1.5 Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk basis keagamaan sejauh ini berorientasi para pemimpin agama, akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah, penyelenggara pemilu harus dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok agama agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan.⁵⁰

Dalam basis keagamaan Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi 3 kali seminggu, yang pertama di Gereja Kampung Jaya Kecamatan Sawitto, kedua di Masjid Jami Kec. Tiroang dan di rumah salah satu warga yang ada di Kecamatan Cempa. Salah satu pemateri dalam sosialisasi tersebut yaitu salah satu Komisioner KPU Kabupaten Pinrang, materi yang disampaikan mengenai pelaksanaan Pilkada, visi dan misi pasangan calon, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan semua materi yang perlu disampaikan telah diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, masyarakat sangat antusias dalam menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Relawan Demokrasi. Tidak hanya itu, KPU Kabupaten Pinrang juga mengadakan kegiatan KPU berzikir dalam rangka menyambut tahun Pilkada 2018 yang dilaksanakan di Masjid Al Munawir Pinrang dan kegiatan

⁵⁰ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Kabupaten Pinrang, h. 11

silaturahmi KPU dan DAI Se-Kabupaten Pinrang yang di adakan di kantor KPU. Metode yang digunakan oleh KPU dan Relawan Demokrasi pada segmen ini yaitu tatap muka dengan memanfaatkan kegiatan keagamaan.

4.3.2.1.6 Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus (Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Perekaman E- KTP Bagi Warga Rutan Kelas II B. Kabupaten Pinrang)

Pemilih dengan kebutuhan khusus, yaitu pemilih yang termasuk orang di daerah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga penjara, pasien rumah sakit, perkebunan. Pemilih kebutuhan khusus menjadi dasar sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pinrang karena minimnya informasi yang mereka peroleh terutama yang terkait dengan kepemiluan, ini dikarenakan mereka tinggal di wilayah yang sulit di jangkau dan tidak semua orang bebas masuk di wilayah tersebut seperti rumah tahanan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi basis berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di Aula Rumah Tahanan Negara kelas II B. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan yaitu sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan perekaman E- KTP bagi warga Rutan kelas II B Kabupaten Pinrang serta ajakan untuk menggunakan hak pilihnya. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kita juga keluar masuk penjara, tapi tujuannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di dalam penjara agar mereka ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya.”⁵¹

⁵¹ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

4.3.2.1.7 Sosialisasi Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan, dalam komunitas manusia-manusia individu didalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.⁵²

Komunitas pada umumnya jauh dari kegiatan politik, bukan berarti mereka tidak tau informasi tentang politik, tidak jarang juga membahas masalah politik yang ada saat ini di tengah melaksanakan kegiatan di komunitas mereka. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu komunitas maka anggota yang lain akan mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pinrang dan Relawan Demokrasi yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih target sosialisasinya yaitu mencakup beberapa komunitas seperti, Komunitas Motor Yamaha Vixion Pinrang, Komunitas Motor Honda CB Pinrang, dan Komunitas Onthel Pinrang, materi sosialisasi yang disampaikan terkait dengan ajakan untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya pada Pilkada serta mengingatkan agar tidak melakukan money politik.

Pemilihan sosialisasi pada basis komunitas ini sangat tepat karena jumlah komunitas yang di Kabupaten Pinrang banyak sehingga informasi kepemiluan yang telah disampaikan oleh KPU dan Relawan Demokrasi tidak hanya diserap dan dilaksanakan oleh pemilih komunitas, tetapi juga dapat dengan mudah disebarluaskan oleh komunitas kepada masyarakat umum.

⁵² Andreas syah pahlevi dkk, *Kalase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*, (Cet. 1 : Cv Oxy Consultant, 2018), h.11

4.3.2.1.8 Grebek Pasar

Grebek pasar adalah suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Relawan demokrasi yang turun langsung ke pasar-pasar tiap kecamatan secara bergiliran, beberapa pasar yang didatangi seperti pasar kariango yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu, pasar lero Kecamatan Suppa, pasar pekkabata Kecamatan Duampanua, pasar marawi Kecamatan Tiroang, pasar langga Kecamatan Mattiro Sompe, pasar jampue Kecamatan Lanrisang, pasar teppo Kecamatan Patampanua, dan pasar kampung jaya Kecamatan Wattang Sawitto.

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Pilkada serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput pada hari pemilihan, dari materi yang disampaikan menerangkan tentang gambaran umum Pilkada yang akan berlangsung serta dapat mendorong agar pedagang yang ada di pasar untuk menggunakan hak pilihnya. Sasaran dalam sosialisasi ini yaitu seluruh pedagang dan masyarakat yang melakukan aktifitasnya di pasar tersebut jumlahnya sangat banyak sehingga informasi yang disampaikan mengenai Pilkada akan dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Metode yang digunakan yaitu tatap muka kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan himbuan kepada masyarakat dan menyebarkan alat peraga seperti brosure dan poster. KPU Kabupaten Pinrang memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan pedagang dan masyarakat yang ada di pasar.

4.3.2.1.9 Sosialisasi bersifat umum (Launching maskot dan jalan santai)

Kegiatan pada segmen ini lebih menekankan kepada semua elemen masyarakat yang bersifat umum dan terbuka. Dalam hal ini KPU bekerja sama dengan stekholder yang ada serta Relawan Demokrasi, anggota PPK dan PPS untuk

membantu melaksanakan kegiatan tersebut. Sasaran sosialisasi ini beraneka ragam seperti para pelajar dan mahasiswa, kalangan pengusaha serta komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Pinrang. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan segmentasi masyarakat secara umum lebih kepada kegiatan yang dapat menghadirkan masyarakat luas sehingga edukasi terhadap materi-materi sosialisasi yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Kegiatan berupa launching maskot yang diadakan pada tanggal 9 Oktober 2017 di M Hotel dengan tema “Mari Berpilkada yang Berbudaya dan Bermartabat” KPU kab. Pinrang sebagai penyelenggara Pilkada akan melaksanakan Pilkada yang lebih memiliki martabat dan memegang teguh budaya dan kearifan lokal. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPU Pinrang, ketua KPU Sulawesi Selatan, para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan beberapa tokoh masyarakat. Selain itu, KPU Kabupaten Pinrang juga menggelar jalan santai bersama warga Pinrang yang berlangsung Minggu, 29 Agustus 2017 pada pukul 07.00 WITA. Kegiatan tersebut melalui beberapa rute, dari Jl. Bintang, Jl Jendral Sudirman, Jl Soemaharjo, Jl Ir Juanda dan kembali ke Jl Bintang atau di depan Kantor KPU, peserta yang mengikuti gerak jalan santai akan mendapat kaos, snack serta door prize yang telah disediakan oleh KPU. Jalan santai diadakan sebagai gerakan sadar Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dan diharapkan agar masyarakat yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa segera mendaftarkan dirinya menjadi pemilih.

4.3.2.2 Kendala yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. KPU

Kab. Pinrang dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 mendapatkan beberapa kendala yaitu:

b. Anggaran Biaya

Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena tahapan inilah KPU kab. Pinrang dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. KPU mendapatkan kendala terkait anggaran biaya untuk sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan luas wilayah serta jumlah penduduk yang ada di Kab. Pinrang sehingga pada tahapan sosialisasi belum bisa menjangkau secara keseluruhan, tetapi KPU hanya memilih beberapa tindakan yang dianggap paling penting.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, jika sumber daya tersebut tidak memadai maka akan berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai. KPU Kabupaten Pinrang dalam hal pengalokasian sumber daya terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018, menemukan kendala yang menjadi penghambat dalam sosialisasi yaitu luasnya wilayah di Kabupaten Pinrang dan jumlah penduduk yang sangat banyak sedangkan jumlah personil KPU yang terbatas sehingga KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Ali Jodding, S.Pd.I dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Kendala utama yang kami hadapi yaitu penganggaran, konsep kita andaikan penganggaran memadai walaupun bukan momentum-momentum Pemilu, kita bisa adakan kursus dan Pendidikan pemilih dimasyarakat sehingga dengan

cerdasnya pemilih lebih menggenggam naluri atau menset berfikir tentang demokrasi, itukan setidaknya kualitas pemilih kita bisa meningkat jadi kendalanya anggaran dari pusat belum terlalu maksimal di sosialisasi dan Pendidikan pemilih. Kita disini bukan regulator tapi hanya pelaksana, kami hanya melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari struktur di atas kita, walaupun kita maunya 10 baru cukup tapi petunjuknya hanya 5 anggaranya maka itu yang kita maksimalkan, selain itu kendala yang dialami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kab. Pinrang yang luas dan hanya 5 Komisioner.⁵³



⁵³ Wawancara Muh. Ali Jodding, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM tanggal 18 September 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang, Setiap organisasi memiliki strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi setiap informan agar organisasi tersebut berhasil dilirik. Sehingga perlu adanya agenda media yang dilakukan untuk mempengaruhi agenda publik. Seperti yang dilakukan organisasi KPU untuk mempengaruhi informan agar partisipan pemilihnya bisa meningkat.

Partisipan yang dimaksud adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat pemilihan. Adapun teori yang digunakan terkait upaya yang dilakukan terhadap peningkatan partisipasi pemilih menggunakan teori agenda *setting*. Untuk itu dalam penentuan strategi dengan pengaruh media yang tepat maka teori agenda *setting* yang tepat menjadi pisau analisis. Teori agenda *setting* yang terdapat dua level yang harus dipenuhi. Agenda *setting* level pertama adalah upaya membangun isu umum yang dinilai penting. Jika dikaitkan dengan KPU, maka penentuan agenda yang tepat ditentukan oleh Ketua Komisioner KPU, upaya dalam membangun isu dengan penentu agenda dengan melakukan rapat, membahas hal yang dianggap penting dalam masyarakat. Mereka akan menyusun dan mempertimbangkan seberapa penting

arti Pilkada dalam masyarakat. Contohnya, dengan melakukan pemilu yang sehat akan menghasilkan pemimpin yang hebat dan membangun suatu desa dengan jujur.

Level kedua adalah menentukan bagian-bagian atau aspek-aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting. Mereka yang terlibat dalam penentuan agenda, akan menyusun aspek-aspek untuk mereka sebariskan melalui media yang telah mereka tentukan, seperti menggunakan media cetak, audio, reklame, ataupun poster. Penentuan isu yang dianggap penting, contohnya golput bukan akhir dari segalanya, pentingnya mengikuti sosialisasi tata cara mencoblos, sosialisasi jangan salah pilih, dan tidak menerima suap dari calon Pilkada, karena hal itu memulai demokrasi yang mengajarkan pimpinan berkuasa karena hasil sogokan. Sehingga mereka yang memegang penentu agenda, akan memengaruhi agenda publik sesuai dengan agenda yang dianggap penting oleh penentu agenda. Sehingga perlu adanya agenda media dengan bersosialisasi melalui media untuk mempengaruhi agenda *public*.

5.1.2 Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pinrang yaitu, strategi komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Pinrang yaitu menggunakan model komunikasi dua tahap. Teori yang menjadi pisau analisis menjawab mengetahui strategi yang dilakukan. Teori dua tahap yang berawal dari Paul Felix Lazarsfaled salah satu teori untuk membedah strategi yang dilaksanakan KPU. Tahap pertama pada teori dua tahap adalah sebagai proses komunikasi massa, yaitu sumbernya adalah komunikator kepada pemuka pendapat. Pada organisasi KPU terdapat komisioner, komisioner sendiri jika dihubungkan dengan teori dua tahap pertama, ia selaku komunikator.

Komisioner membentuk pemuka pendapat, jika dikaitkan dengan KPU dikenal sebagai relawan demokrasi. Komisioner merekrut anggota relawan demokrasi sebanyak 25 orang. Relawan demokrasi yang terbentuk akan menyampaikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih dan segala bentuk upaya untuk meningkatkan partisipan kepada masyarakat. Hal ini termasuk tahap kedua diteori dua tahap, yaitu sebagai proses komunikasi antarpersonal, yaitu dimulai dari pemuka pendapat kepada pengikut-pengikutnya. Sehingga digambarkan sebagai bentuk media massa- *pesan-opinion leader-follower*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran dari peneliti yaitu:

- 5.2.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pinrang bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi tahap partisipasi masyarakat,serta meningkatkan lagi strategi yang telah digunakan pada pilkada tahun 2018.
- 5.2.2 Untuk masyarakat Kabupaten Pinrang terutama pemilih pemula dan pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amrizal Dedi dkk. 2018. *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Alqi
- Adhani Hani. *Sengketa Pilkada Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*
- Damsar. 2018. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana
- Daryanto. 2014. *Teori Komunikasi*, Gunung Samudera.
- Duha Timotius. 2018. *perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Duha Timotius. 2018. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Effendy, Onong Uchjana. 1984. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang UNISMUH Malang
- Hasan Ma'ali. 2015. *Strategi Komunikasi Politik Kiai dalam Suksesi Pilpres 2014 (Studi di Desa Gardu Barat Kecamatan Gading Kabupaten Sumenep Madura)*” (Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Hikmat M . Mahi. 2010. *Komunikasi Politik Teori dan Praktek (Dalam Pilkada Lansung)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Huberman dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*

- Jiddatun Nihayah. 2016. *Strategi Komunikasi Penggelangan Dana Sosial Sedekah Rombongan Melalui Instagram* (Skripsi Sarjana : Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Ilam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana
- Kementrian Agama RI. 2004. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Al-Jamanatu' Ali)
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana
2018. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang
- Madura Jeff. 2007. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta; Kencana
- Muhalin Lalongan dan Rahmawati Halim. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik*. Makassar: CV Sah Media
- Nasution. S. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Pahlevi Andreas syah dkk. 2018. *Kalase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*. (Cv Oxy Consultant
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta Barat: Graha Ilmu
- Sugianto.2018. *Ilmu Negara : Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama)
- Surbakti Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suyadi. 2013. *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*. Yogyakarta: Diva Press
- Triantono. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*
- Yupi Perando. 2009. *Strategi Komunikasi dan Aktivitas Humas UIN Sunan Kalijaga Kepada Calon Mahasiswa Tahun 2009* (Skripsi Sarjana: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta

<https://kpu-pinrangkab.blogspot.com/p/blog-page.html>

https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2010%20TAHUN%202018.pdf



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurhang, lahir di Pinrang pada tanggal 23 November 1997, anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Atira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam dan Penulis kini beralamat di Dusun Menro, Desa WT. Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Sekolah Dasarnya pada tahun 2009 di SDN 201 Mattagie, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 4 Suppa dan selesai pada tahun 2012. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMKN 3 Pinrang dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

